



2023

**RENCANA KERJA (R E N J A)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renja Bappeda tahun 2023 ini. Rencana Kerja (Renja) Bappeda merupakan dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun, dan merupakan penjabaran dari Renstra Bappeda 2023-2026. Renja Bappeda Tahun 2023 memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dalam satu tahun anggaran yang memuat, tujuan, sasaran, dan target capaian kinerja yang akan di capai pada tahun 2023. Oleh karena itu, dokumen ini akan menjadi sebagai acuan bagi aparatur di lingkungan Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023.

Disamping itu, melalui review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, dokumen ini diharapkan dapat memperjelas kondisi aktual dan tingkat akselerasi pencapaian kinerja serta reformulasi strategi pada setiap unit kerja di Bappeda yang disertai dengan kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah maupun masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka seluruh aparatur Bappeda Kabupaten Barito Selatan dan lembaga terkait berkewajiban untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2023 agar dapat menghasilkan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan secara optimal serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Buntok, 2023

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Barito Selatan,
Kepala

JAYA WARDANA AP, SE., M.Ec Dev
NIP. 19740702 199403 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1Latar Belakang.....	1
1.2Maksud dan Tujuan.....	6
1.3Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU	13
2.1Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	13
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.....	19
2.2Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.3Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	39
2.4Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	43
2.5Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	43
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	44
3.1Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	44
3.2Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	45
3.3Program dan Kegiatan.....	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	51
BAB V PENUTUP.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021	14
Tabel 2. 2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021	19
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Barito Selatan	37
Tabel 3. 1 Permasalahan Pelayanan Bappeda Kab. Barito Selatan berdasarkan Rencana Strategis Kementrian PPN / Bappenas Beserta Faktor Penghambat/Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	45
Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah Bappeda Kab. Barito Selatan	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tema Pembangunan	6
-----------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

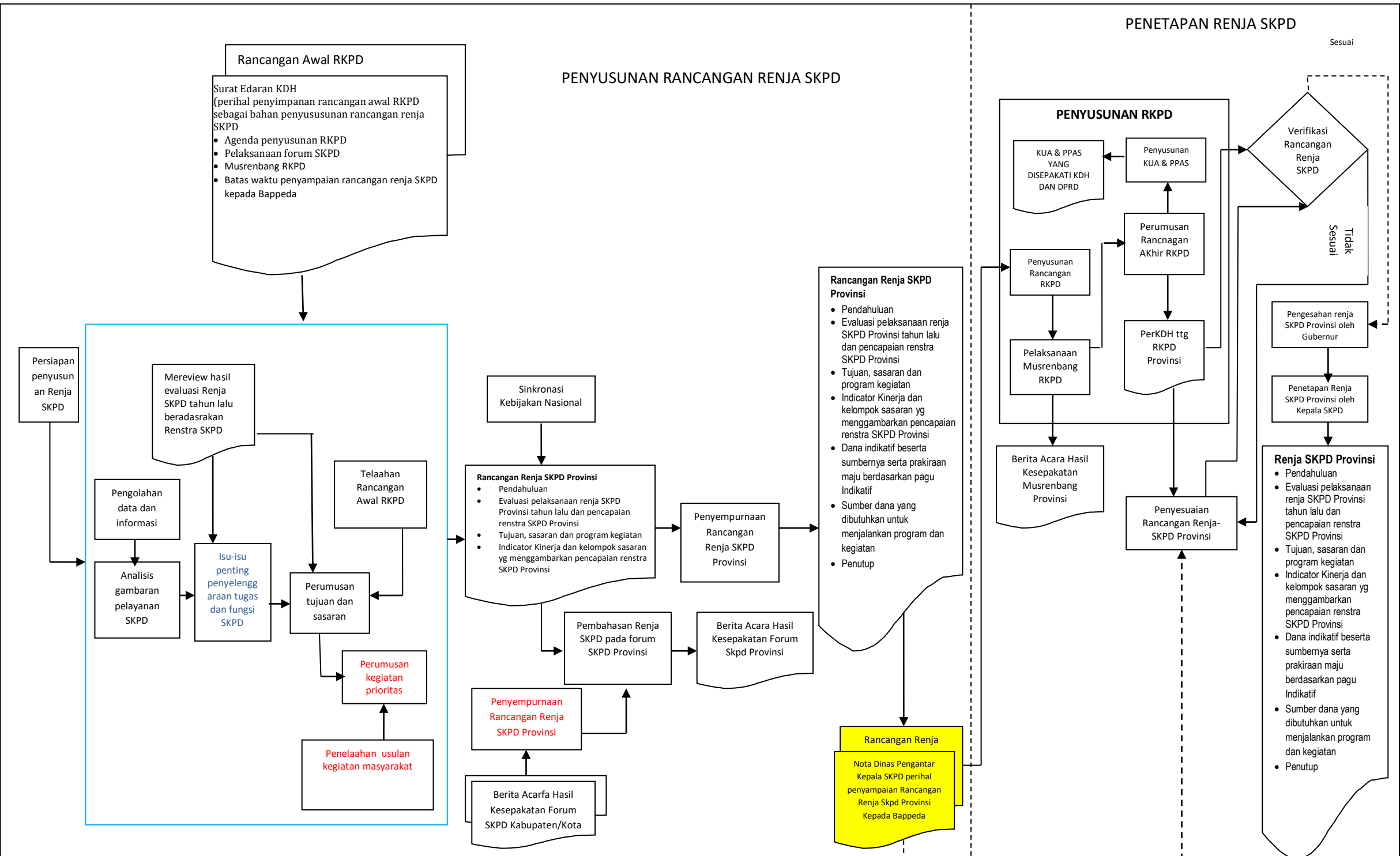
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kedalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD), juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Dokumen tersebut merupakan dokumen perencanaan PD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barito Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah, memiliki tanggungjawab membantu Kepala Daerah melalui tugas pokok dan fungsi dalam bidang perencanaan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026. Penjabaran visi dan misi tersebut disusun dalam dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 yang memuat visi, misi, strategi, dan kebijakan Bappeda untuk mencapai misi dan indikator kinerja utama Kepala Daerah, serta untuk menangani isu strategis pelayanan Bappeda Kabupaten Barito Selatan.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Renja Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023, perlu disusun untuk menjabarkan prioritas dan target dari setiap program dan kegiatan Tahun 2023 yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026. Selanjutnya Renja Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran kegiatan Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023.

Berikut ini adalah bagan alir tahapan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota :



Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 yaitu berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, disebutkan bahwa :

“Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota, Analisa pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap keempat, dan isu strategis aktual.”

Mengacu kepada hal tersebut di atas, maka periode Tahun 2023-2026 ini adalah merupakan periode keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan 2006-2026 yang bertujuan memiliki Visi untuk mewujudkan Barito Selatan yang Maju, Mandiri dan Profesional yang Beriman dan Bertakwa. Oleh sebab itu, rumusan Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026, dirumuskan dalam rangka untuk melakukan percepatan pencapaian Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026, yang diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Secara umum telah dirumuskan sebanyak Enam (Enam) Tujuan Pembangunan, dan sebanyak 15 (Lima Belas) sasaran Pembangunan pada Rencana pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Tujuan pertama adalah “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu :
 - 1.1 Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah.
 - 1.2 Meningkatnya konektivitas wilayah.
- 2) Tujuan Kedua adalah “Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu:
 - 2.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
 - 2.2. Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Kabupaten.
- 3) Tujuan Ketiga adalah “Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat”, terdiri dari 4 (empat) Sasaran Pembangunan yaitu:
 - 3.1. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat.
 - 3.2. Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan.
 - 3.3. Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah

- 4) Tujuan Keempat adalah “Mewujudkan peningkatan ketahanan daerah terhadap resiko ancaman bencana dan budaya serta kerentanan pangan”, terdiri dari 1 (satu) sasaran pembangunan yaitu :
 - 4.1. Meningkatnya kapasitas antisipasi dan penanganan terhadap bencana, pandemi dan ketahanan pangan.
- 5) Tujuan Kelima adalah “Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif”, terdiri dari tiga (tiga) sasaran pembangunan yaitu :
 - 5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.
 - 5.2. Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat.
 - 5.3. Meningkatnya pengembangan e-goverment menuju smart city.
- 6) Tujuan Keenam adalah “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia”, terdiri dari dua (dua) sasaran pembangunan yaitu :
 - 6.1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, keluarga dan ketenagakerjaan.
 - 6.2. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - 6.3. Meningkatkan pemajuan pembangunan kebudayaan.

Dari rumusan tujuan dan sasaran diatas, tujuan ke 5 (lima) yaitu meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif, dari tujuan tersebut ada dua sasaran yang pembangunan yang menjadi tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu; 1). Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel, 2). Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat. Dalam tujuan tersebut terkandung amanat bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai urusan pemerintahan yang diampu oleh Bappeda yaitu urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023 sesuai Prioritas Daerah Kabupaten Barito Selatan yang tercantum dalam dokumen RKPD Tahun 2023, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Untuk memberi arah pembangunan tahunan pada Rencana Pembangunan Daerah di buat Fokus Tema Pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang menjadi acuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023-2026 untuk masing-masing Rencana Kerja Pemerintah Daerah dari Tahun 2023-2026.

Gambar 1.1 Tema Pembangunan



1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renja-PD dimaksudkan sebagai pedoman dan arah kebijakan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Barito Selatan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Bappeda Kab. Barito Selatan selama tahun 2023.

b. Tujuan

Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 bertujuan memperlancar tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Barito Selatan di bidang perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancangan Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengembangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan pembangunan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2004 tentang penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan
20. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.

1.3 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Kerja Perangkat daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 sekurang-kurangnya dapat disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan table analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 (Format tabel pada Permendagri 86 Tahun 2017)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

- a) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD; Khusus Provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota serta dengan kementerian dan Lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
- b) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*); d). Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.
- d) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Renja

Berisikan uraian mengenai:

- a).Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan

awal Renja dengan hasil analisis kebutuhan; b). Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; c). Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Renja, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal Renja, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; d). Lampirkan table T-C.31

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada PD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain;

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai a). Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan b). Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; c) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan,

pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya; d) Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2021 (n-2) dan perkiraan capaian tahun 2022 (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bappeda berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Bappeda tahun-tahun sebelumnya.

Penyusunan Renja Bappeda berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Bappeda.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Barito Selatan tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2021 Bappeda Kab. Barito Selatan melaksanakan 17 (tujuh belas) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah **Rp. 8.097.403.688** (Delapan Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah). Pada perubahan anggaran Bappeda Kabupaten Barito Selatan mengalami pengurangan dalam rangka refocusing anggaran untuk penanganan pandemic Covid-19 sebesar **Rp. 468.050.889,00** (Empat ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah). Sehingga anggaran Bappeda setelah perubahan menjadi **Rp. 7.629.352.799,00** (Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah). Kemudian Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan dengan realisasi anggaran **Rp. 7.053.108.485,00** (Tujuh Milyar Lima Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima rupiah) atau sebesar 92,57%. Berikut ini adalah realisasi keuangan program dan kegiatan tahun 2021

Tabel 2. 1
Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)		Realisasi		
		Murni	Perubahan	Keuangan		Fisik
				Rp.	(%)	(%)
1	2	3	4	6	7	8
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	8.097.403.688	7.629.352.799	7.053.108.485	92,57%	92,57%
	Perencanaan	8.037.403.688	7.589.352.799	7.020.878.885	92,55%	92,55%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.793.813.688	5.497.457.799	5.082.125.563	90,28%	90,28%
I	<i>Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	65.000.000	66.010.000	64.426.700	97,60%	97,60%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100,00%	100,00%
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.000.000	12.103.000	11.827.000	97,72%	97,72%
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.000.000	8.000.000	7.146.000	89,33%	89,33%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.000.000	7.000.000	6.920.200	98,86%	98,86%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.000.000	7.000.000	6.636.500	94,81%	94,81%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	24.907.000	24.897.000	99,96%	99,96%
II	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	4.702.308.688	4.440.090.959	3.937.115.057	88,67%	88,67%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.626.508.688	4.360.090.959	3.587.119.057	88,46%	88,46%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.600.000	21.800.000	21.796.000	99,98%	99,98%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.600.000	20.600.000	20.600.000	100,00%	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100,00%	100,00%
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00%	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	20.600.000	20.600.000	20.600.000	100,00%	100,00%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00%	100,00%
III	<i>Administrasi Barang Milik Daerah</i>	47.800.000	47.800.000	47.800.000	100%	100%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00%	100,00%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42.800.000	42.800.000	42.800.000	100,00%	100,00%
IV	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	69.400.000	73.431.900	71.301.800	97,10%	97,10%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	69.400.000	73.431.900	71.301.800	97,10%	97,10%
V	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	447.085.000	355.733.890	355.733.890	99,90%	99,90%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.990.000	28.886.790	28.884.756	99,99%	99,99%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	43.993.100	43.902.700	99,79%	99,79%

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.895.000	42.575.000	42.575.000	100,00%	100,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	00	-	0%	0%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.000.000	34.950.000	34.780.000	99,51%	99,51%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265.000.000	173.680.000	173.583.458	99,94%	99,94%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.200.000	34.649.000	31.645.000	99,99%	99,99%
VI	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	20.020.000	260.295.450	242.268.45	93,07%	93,07%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.020.000	260.295.450	242.268.45	93,07%	93,07%
VII	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	377.250.000	338.445.600	317.822.642	93,91%	93,91%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	9.000.000	9.000.000	100,00%	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	255.000.000	195.195.600	174.577.642	89,44%	89,44%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	116.250.000	134.250.000	134.245.000	100,00%	100,00%
VIII	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	64.950.000	47.750.000	46.020.000	96,38%	96,38%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000	25.000.000	24.960.000	99,84%	99,84%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.950.000	22.750.000	21.060.000	92,57%	92,57%
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	711.900.000	591.290.300	586.982.538	99,27%	99,27%
IX	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	412.500.000	327.200.800	325.433.200	99,46%	99,46%
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD /Lintas SKPD	50.000.000	37.826.800	37.826.800	100,00%	100,00%
	Pelaksanaan MUsrenbang Kabupaten/Kota	40.000.000	31.842.200	31.842.200	100,00%	100,00%
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	66.000.000	71.141.800	71.141.800	100,00%	100,00%
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	256.500.000	186.390.000	184.622.400	99,05%	99,05%
X	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	75.600.000	20.304.000	20.304.000	100,00%	100,00%
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	15.000.000	2.580.000	2.580.000	100,00%	100,00%
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	60.600.000	17.724.000	17.724.000	100,00%	100,00%
XI	<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	223.800.000	243.785.500	241.245.338	98,96%	98,96%
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	135.600.000	181.608.400	179.068.238	98,60%	98,60%
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	88.200.000	62.177.100	62.177.100	100,00%	100,00%

XII	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.531.690.000	1.365.290.000	1.351.770.784	99,01%	99,01%	
		388.990.000	325.290.000	319.473.850	98,21%	98,21%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	27.000.000	23.020.000	22.482.000	97,66%	97,66%	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	15.000.000	10.400.000	10.400.000	100,00%	100,00%	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	30.000.000	24.932.000	24.923.000	99,96%	99,96%	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	48.000.000	40.254.100	40.252.100	100,00%	100,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.000.000	10.714.000	10.684.800	99,73%	99,73%	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	15.000.000	21.250.000	21.250.000	100,00%	100,00%	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	65.000.000	44.330.000	44.313.000	99,96%	99,96%	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	158.990.000	158.389.900	145.168.950	96,53%	96,53%	
	XIII	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	445.100.000	405.100.000	398.711.034	98,42%	98,42%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	130.000.000	116.844.000	116.648.534	99,83%	99,83%	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3.250.000	2.508.700	2.491.200	99,30%	99,30%	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	50.000.000	64.929.000	63.298.400	97,49%	97,49%	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	130.000.000	133.688.000	130.490.700	97,61%	97,61%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	34.100.000	18.011.600	18.011.600	100,00%	100,00%	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2.750.000	1.677.000	1.677.000	100,00%	100,00%	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	60.000.000	40.021.000	38.672.900	96,63%	96,63%	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	35.000.000	27.420.700	27.420.700	100,00%	100,00%	

XIV	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	697.600.000	634.900.000	633.585.900	99,79%	99,79%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	70.150.000	56.150.000	56.094.000	99,90%	99,90%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00%	100,00%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	80.150.000	71.908.700	71.563.000	99,52%	99,52%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	215.150.000	187.347.300	187.012.900	99,82%	99,82%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	80.150.000	80.150.000	80.134.000	99,98%	99,98%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	246.000.000	233.344.000	232.782.000	99,76%	99,76%
	Penelitian dan Pengembangan	60.000.000	33.214.700	32.229.600	97,03 %	97,03 %
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	60.000.000	33.214.700	32.229.600	97,03 %	97,03 %
XV	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	60.000.000	33.214.700	32.229.600	97,03%	97,03%

Wabah corona memaksa kita untuk merevisi perencanaan pembangunan. Target disesuaikan secara realistis, asumsi diubah sesuai keadaan sekarang, dan prioritas program jangka pendek dialihkan sebagian besar untuk mengatasi pandemic Covid-19. Sementara kebijakan pembangunan padat modal seperti infrastruktur dilakukan moratorium dan akan dikaji untuk dilaksanakan kembali setelah periode tanggap darurat Covid-19 dinyatakan berakhir. Dampak sosial dan ekonomi yang melanda Indonesia akibat pandemi ini memaksa semua level pemerintahan baik pusat dan daerah untuk melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Terutama yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran mengingat pada saat menyusun sama sekali tidak memperhitungkan pandemi. Penyesuaian yang tepat dan kebijakan yang terukur dalam menangani wabah corona akan menjadi titik awal untuk pemulihan. Seperti diketahui, pemerintah terus mengupayakan pemulihan ekonomi dalam kondisi Covid-19 ini, salah satu upaya yang sedang dilakukan pemerintah dengan melakukan refocusing dan realokasi anggaran baik dari APBN maupun APBD untuk penanganan Covid-19. Refocusing dan realokasi tersebut diprioritaskan pada bidang kesehatan, penanganan jejaring sosial serta bantuan bagi dunia usaha.

Dari tabel realisasi keuangan diatas seluruh program dan kegiatan bisa dilaksanakan semaksimal mungkin dengan anggaran yang tersedia.

Berdasarkan regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenkatur perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman bagi seluruh pemerintah daerah untuk mewujudkan single codebase, berupa penggolongan atau pengelompokan dan pemberian kode. Disamping itu sebagai daftar

penamaan untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban untuk pelaporan kinerja dan keuangan.

Dalam pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah dilakukan evaluasi terhadap rencana perangkat daerah dan capaian rencana strategis sampai dengan tahun berjalan yang disajikan dalam tabel 3 dibawah ini.

Tabel 2. 2
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan

Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun....)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun ... (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
												I		II		III		IV						13		14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%					
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%		16				
							Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang																										
							Bid.Urusan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan																										
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																										
							Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah																										
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																										
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																										

5	0	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Doku men	35.146.125	4	Doku men	23.852.025	1	Doku men	10.000.000	Doku men	-	Doku men	-	1	Doku men	7.340.000	0	Doku men	2.660.000	1	Doku men	10.000.000	5	Doku men	33.852.025	100	%	33.852.025	BAPPEDA		
5	0	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Doku men	30.146.125	4	Doku men	23.626.225	1	Doku men	6.000.000	Doku men	-	Doku men	-	0	Doku men	-	1	Doku men	6.000.000	1	Doku men	6.000.000	5	Doku men	29.626.225	100	%	29.626.225	BAPPEDA		
5	0	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Doku men	30.146.125	4	Doku men	23.342.525	1	Doku men	6.000.000	Doku men	-	Doku men	-	0	Doku men	2.803.000	1	Doku men	3.197.000	1	Doku men	6.000.000	5	Doku men	29.342.525	100	%	29.342.525	BAPPEDA		
5	0	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	Doku men	105.851.600	12	Doku men	92.464.600	3	Doku men	17.773.000	2	Doku men	1.961.250	1	Doku men	3.011.750	0	Doku men	-	0	Doku men	12.800.000	3	Doku men	17.773.000	15	Doku men	110.237.600	100	%	110.237.600	BAPPEDA

	5	0	0	2	0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Doku men	7.327.000		Doku men	1	Doku men	11.527.000	9	Doku men	6.266.750	1	Doku men	1.060.250	0	Doku men	-	0	Doku men	4.200.000	1	Doku men	11.527.000	1	Doku men	11.527.000	20	%	11.527.000	BAPPEDA		
	5	0	0	2	0	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																	
	5	0	0	2	0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6	Bulan	21.709.318.600	48	Bulan	16.198.210.445	12	Bulan	4.237.448.132	3	Bulan	588.807.809	3	Bulan	1.074.601.370	3	Bulan	1.285.182.366	3	Bulan	986.931.363	12	Bulan	3.935.522.908	6	Bulan	20.133.733.353	100	%	20.133.733.353	BAPPEDA	
	5	0	0	2	0	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	Doku men	50.000.000	24	Doku men	32.210.768	6	Doku men	185.600.000		Doku men	2.672.000	1	Doku men	2.600.000	2	Doku men	5.828.000	3	Doku men	174.500.000	6	Doku men	185.600.000	3	Doku men	217.810.768	100	%	217.810.768	BAPPEDA	
	5	0	0	2	0	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6	Doku men	51.700.000	12	Doku men	31.014.766	12	Doku men	20.600.000	3	Doku men	3.280.000	3	Doku men	3.814.500	3	Doku men	4.761.000	3	Doku men	8.744.500	12	Doku men	20.600.000	24	Doku men	51.614.766	40	%	51.614.766	BAPPEDA	
	5	0	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	Doku men	45.338.000		Doku men	15.414.766	1	Doku men	8.338.000	1	Doku men	8.338.000	0	Doku men	-	0	Doku men	-	0	Doku men	-	1	Doku men	8.338.000	1	Doku men	23.752.766	20	%	23.752.766	BAPPEDA	
	5	0	0	2	0	0	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Doku men	20.500.000	24	Doku men	36.956.100	6	Doku men	5.000.000	4	Doku men	1.089.500	0	Doku men	1.733.000	1	Doku men	950.000	1	Doku men	1.227.500	6	Doku men	5.000.000	3	Doku men	41.956.100	100	%	41.956.100	BAPPEDA	

5	0	0	2	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	5	Set						10.975.000						5	Set	10.975.000	5	Set	10.975.000	100	%	10.975.000	BAPPEDA															
5	0	0	2	0	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35	Dokumen	108.431.900,00	28	Dokumen	71.301.800	7	Dokumen	39.315.000	3	Dokumen	1.050.000	1	Dokumen	13.618.000	1	Dokumen	7.408.000	2	Dokumen	17.146.000	7	Dokumen	39.222.000	35	Dokumen	110.523.800	100	%	110.523.800	BAPPEDA							
5	0	0	2	0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	Orang	166.221.866	14	Orang	133.551.416	1	Orang	4.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-	0	Orang	-	1	Orang	4.000.000	1	Orang	4.000.000	15	Orang	137.551.416	100	%	137.551.416	BAPPEDA							
5	0	0	2	0	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	30	Orang	14.700.000				3	Orang	9.800.000	-	Orang	-	-	Orang	-	2	Orang	8.000.000	0	Orang	-	2	Orang	8.000.000	2	Orang	8.000.000	7	%	8.000.000	BAPPEDA							
5	0	0	2	0		Administrasi Umum Perangkat Daerah																																712.768.553			712.768.553			712.768.553	
5	0	0	2	0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	Paket	116.520.870	16	Paket	103.793.256	4	Paket	52.373.732	3	Paket	9.947.850	1	Paket	2.586.230	0	Paket	-	0	Paket	39.839.652	4	Paket	52.373.732	20	Paket	156.166.988	100	%	156.166.988	BAPPEDA							
5	0	0	2	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Paket	193.993.100,00	48	Paket	163.533.300	12	Paket	59.320.000	3	Paket	11.632.000	3	Paket	11.686.000	5	Paket	5.757.500	1	Paket	30.244.500	12	Paket	59.320.000	60	Paket	222.853.300	100	%	222.853.300	BAPPEDA							
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	1	Paket				1	Paket	56.700.000										1	Paket	56.175.000	1	Paket	56.175.000	1	Paket	56.175.000	100	%	56.175.000	BAPPEDA								

5	0	0	2	0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	148.220.850	4	Paket	123.053.450	1	Paket	50.562.750	3	Paket	11.785.500	3	Paket	8.190.000	4	Paket	3.540.000	2	Paket	27.047.250	1	Paket	50.562.750	6	Paket	173.616.200	100	%	173.616.200	BAPPEDA				
5	0	0	2	0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar / Majalah / Buku	5	Eksempplar	68.080.01	1	Eksempplar	59.662.335														0	Paket	-	1	Paket	59.662.335	25	%	59.662.335	BAPPEDA						
5	0	0	2	0	0	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6	Laporan	516.368.000	4	Laporan	350.049.000	1	Laporan	40.353.000	3	Laporan	8.180.000	3	Laporan	8.812.500	3	Laporan	9.000.000	3	Laporan	14.335.000	1	Laporan	40.327.500	6	Laporan	774.058.571	100	%	774.058.571	BAPPEDA				
5	0	0	2	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	Laporan	982.224.712	4	Laporan	878.007.103	1	Laporan	432.322.000	3	Laporan	46.692.046	1	Laporan	89.371.144	2	Laporan	108.285.912	4	Laporan	179.660.469	1	Laporan	424.009.571	6	Laporan	1.302.016.674	100	%	1.302.016.674	BAPPEDA				
5	0	0	2	0	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	61.649.000	8	Dokumen	31.645.000	2	Dokumen	30.000.000	1	Dokumen	3.320.000	0	Dokumen	7.055.000	0	Dokumen	7.025.000	1	Dokumen	12.600.000	2	Dokumen	30.000.000	1	Dokumen	61.645.000	100	%	61.645.000	BAPPEDA				
5	0	0	2	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																																				
5	0	0	2	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer PC/Laptop, Printer, Sound System yang dilaksanakan melalui Pengadaan Langsung	1	Unit	296.295.450,00	4	Unit	275.268.450	9	unit	301.020.000	1	unit	2.430.000	0	unit	-	0	unit	-	8	unit	279.335.000	9	unit	281.765.000	1	unit	557.033.450	87	%	557.033.450	BAPPEDA				
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																																	#DIV/0!			
5	0	0	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																				

5	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Laporan	33.000.000	48	Laporan	27.000.000	12	Laporan	6.000.000	2	Laporan	1.200.000	4	Laporan	1.800.000	3	Laporan	1.800.000	3	Laporan	1.200.000	12	Laporan	6.000.000	60	Laporan	33.000.000	100	%	33.000.000	BAPPEDA
5	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Bulan	914.152.593	48	Bulan	573.680.827	12	Bulan	208.678.752	4	Bulan	48.303.108	2	Bulan	47.870.541	3	Bulan	51.197.932	3	Bulan	52.725.153	12	Bulan	200.096.734	60	Bulan	773.777.561	100	%	773.777.561	BAPPEDA
5	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	1.718.383.000	48	Laporan	1.454.731.200	12	Laporan	126.783.000	2	Laporan	10.540.000	4	Laporan	23.748.000	3	Laporan	41.745.000	3	Laporan	50.750.000	12	Laporan	126.783.000	60	Laporan	1.581.514.200	100	%	1.581.514.200	BAPPEDA
5	0	0	2	0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																
5	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	120.000.000	4	Unit	95.115.215	1	Unit	32.737.500	-	Unit	-	1	Unit	10.416.000	0	Unit	-	0	Unit	11.825.999	1	Unit	22.241.999	5	Unit	117.357.214	100	%	117.357.214	BAPPEDA
5	0	0	2	0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150	Unit	117.384.545	120	Unit	75.021.003	30	Unit	35.535.000	3	Unit	3.405.000	4	Unit	11.390.000	3	Unit	9.375.000	20	Unit	17.420.000	30	Unit	41.590.000	150	Unit	116.611.003	100	%	116.611.003	BAPPEDA
5	0	0	2	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	Tahun	349.915.000	1	Tahun	296.715.000	1	Tahun	100.000.000	0	Tahun	20.000.000	1	Tahun	29.915.000	0	Tahun	-	0	Tahun	50.000.000	1	Tahun	99.915.000	2	Tahun	396.630.000	50	%	396.630.000	BAPPEDA
5	0	0				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH																																
5	0	0	2	0		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan																																

5	0	0	2	0	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	7	PD	66.300.000	7	PD	54.425.800	7	PD	10.400.000	7	PD	10.400.000	0	PD	-	0	PD	-	0	PD	-	7	PD	10.400.000	14	PD	64.825.800	200	%	64.825.800	BAPPEDA
5	0	0	2	0	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	7	PD	164.702.000,00	7	PD	121.743.900	7	Laporan	18.071.000	4	Laporan	2.475.000	2	Laporan	3.150.000	1	Laporan	56.273.100	7	Laporan	79.969.100	14	Laporan	201.713.000	200	%	201.713.000	BAPPEDA			
5	0	0	2	0	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	7	PD	147.004.100,00	7	PD	107.347.600	7	PD	-	5	PD	2.100.000	2	PD	27.048.888	2	PD	22.947.000	7	PD	52.095.888	14	PD	159.443.488	200	%	159.443.488	BAPPEDA			
5	0	0	2	0	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPMD)	10	Dokumen	298.189.777	8	Dokumen	259.600.182	2	Dokumen	-	2	Dokumen	23.891.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	56.050.400	2	Dokumen	79.941.400	10	Dokumen	339.541.582	100	%	339.541.582	BAPPEDA			

5	0	0	2	0	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9	PD	36.250.000,00	9	PD	21.250.000	9	PD	15.000.000	600.000	PD	-	9	PD	14.400.000	0	PD	-	9	PD	15.000.000	18	PD	36.250.000	200	%	36.250.000	BAPPEDA	
5	0	0	2	0	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9	PD	161.580.000,00	9	PD	105.636.600	9	PD	55.000.000	1.050.000	PD	22.789.000	9	PD	24.377.400	0	PD	6.771.000	9	PD	54.987.400	18	PD	160.624.000	200	%	160.624.000	BAPPEDA	
5	0	0	2	0	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	9	Laporan	776.206.950,00	9	Laporan	598.888.724	9	Laporan	176.990.000	29.977.000	3	Laporan	50.717.500	4	Laporan	8.670.600	2	Laporan	87.487.800	9	Laporan	176.852.900	18	Laporan	775.741.624	200	%	775.741.624	BAPPEDA
5	0	0	2	0	0	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)																					519.626.100									

5	0	0	2	0	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	1	Doku	362.211.	1	Doku	244.396.	3	Doku	191.000			42.086	1	Doku	43.067.	1	Doku	9.249.6	1	Doku	94.496	3	Doku	188.900	1	Doku	433.296.	100	%	433.296.	BAPPEDA
	1	3		2	1			5	men	200	2	men	661			.000			.500			.000			.00			.900			.661			.661				
5	0	0	2	0	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6	PD	34.014.9	6	PD	29.911.1	6	PD	3.180.0			770.0	6	PD	500.000	0	PD	1.910.0	0	PD	-	6	PD	3.180.0	1	PD	33.091.1	200	%	33.091.1	BAPPEDA
	1	3		2	2					00		00			.00			0						00					00		2	00		00		00		
5	0	0	2	0	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	1	Lapor	326.028.	1	Lapor	270.289.	3	Lapor	37.000.			9.135.	1	Lapor	17.482.	0	Lapor	7.509.0	2	Lapor	2.811.	3	Lapor	36.937.	1	Lapor	307.227.	100	%	307.227.	BAPPEDA
	1	3		2	3			5	an	600	2	an	700			.000			.000			.400			.00			.000			.400			.100			.100	
5	0	0	2	0	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5	Lapor	364.998.	4	Lapor	225.408.	1	Lapor	190.000			31.440	0	Lapor	26.512.	1	Lapor	31.470.	0	Lapor	100.57	1	Lapor	190.000	5	Lapor	415.408.	100	%	415.408.	BAPPEDA
	1	3		2	4					00,00		176			.000			.800			.600			.800			.800			.000			.176			.176		

5	0	0	2	0	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	3	Doku men	232.395. 000	2	Doku men	188.964. 642	6	Doku men	43.150. 000	1	Doku men	5.865. 000	3	Doku men	29.052. 200	1	Doku men	7.402.2 00	1	Doku men	-	6	Doku men	42.319. 400	3	Doku men	231.284. 042	100	%	231.284. 042	BAPPEDA
5	0	0	2	0	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	6	Pera ngkat Daer ah	51.722.5 00	6	Pera ngkat Daer ah	43.934.5 00	6	Pera ngkat Daer ah	6.000.0 00	0	-	-	3	Pera ngkat Daer ah	3.250.0 00	1	Pera ngkat Daer ah	-	2	Pera ngkat Daer ah	2.750. 000	6	Pera ngkat Daer ah	6.000.0 00	1	Pera ngkat Daer ah	49.934.5 00	200	%	49.934.5 00	BAPPEDA
5	0	0	2	0	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	6	Pera ngkat Daer ah	276.789. 200	6	Pera ngkat Daer ah	196.309. 000	6	Pera ngkat Daer ah	80.150. 000	1	Pera ngkat Daer ah	5.650. 000	2	Pera ngkat Daer ah	31.030. 000	1	Pera ngkat Daer ah	16.500. 000	2	Pera ngkat Daer ah	25.200 .000	6	Pera ngkat Daer ah	78.380. 000	1	Pera ngkat Daer ah	274.689. 000	200	%	274.689. 000	BAPPEDA
5	0	0	2	0	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3	Lapor an	654.952. 075	2	Lapor an	470.437. 675	6	Lapor an	219.450 .000	2	Lapor an	68.933 .700	3	Lapor an	95.286. 800	0	Lapor an	15.304. 100	1	Lapor an	39.678 .070	6	Lapor an	219.202 .670	3	Lapor an	689.640. 345	100	%	689.640. 345	BAPPEDA

5	0	0	2	0	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	30	Dokumen	667.393.500	24	Dokumen	586.507.500	6	Dokumen	80.150.000	2	Dokumen	24.040.000	0	Dokumen	5.000.000	2	Dokumen	28.346.000	2	Dokumen	22.716.000	6	Dokumen	80.102.000	30	Dokumen	666.609.500	100	%	666.609.500	BAPPEDA		
5	0	0	2	0	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	30	Laporan	966.844.000,00	24	Laporan	898.282.000	6	Laporan	191.000.000	1	Laporan	5.714.000	2	Laporan	36.908.800	2	Laporan	17.008.200	1	Laporan	130.437.021	6	Laporan	190.068.021	30	Laporan	1.088.350.021	100	%	1.088.350.021	BAPPEDA		
5	0					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																																		
5	0	0				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																																		
5	0	0	2	0	0	Pengembangan Inovasi dan Teknologi																																		
5	0	0	2	0	0	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																																	
						Rakornas Litbang Kemendagri		5	Tahun	575.522.600		Tahun	537.969.612																											
						Terselenggaranya Edukasi Perekayasaan Litbang dan IPTEK																																		

							Terselenggaranya Inventarisasi Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA)																					
							Terselenggaranya Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah																					

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Bappeda melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan yang masuk kedalam urusan fungsi penunjang. Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju good governance berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture-set penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (output) menjadi berorientasi kinerja (outcome) merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja yaitu rumus bagi IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Bappeda Kabupaten Barito Selatan menetapkan indikator kinerja serta target capaian indikator kinerja (Indikator Kinerja Utama/IKU) yang ingin dicapai tiap tahun,

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Barito Selatan

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD		100%	100%	100%	100%	100%	106,67%	93,07%	100%	100%	
5	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan PD dan Hal Kritis Pelayanan Bappeda Kabupaten Barito Selatan

Hal kritis dalam menjalankan tupoksi Bappeda adalah: (1) menyelaraskan antara program dan kegiatan seluruh perangkat daerah sehubungan dengan kurang sinkronnya Renja perangkat daerah dengan RPJMD (2) tingkat kualitas perencanaan pembangunan yang ditunjukkan oleh: jumlah ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan, tingkat kesesuaian perencanaan dengan pendanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; (3) tingkat kualitas layanan informasi dan perencanaan pembangunan yang ditunjukkan oleh frekuensi pelayanan publik dalam proses perencanaan pembangunan; (4) proses perencanaan dan pengendalian yang efektif dan efisien yang ditunjukkan oleh: tingkat efektivitas proses perencanaan dan pengendalian berbasis teknologi dan Informasi. Pada proses ini perlu peningkatan kapasitas dari fungsi RKPD online sebagai input, satu data pembangunan sebagai fungsi pengolahan, analisis data dan informasi, dan *integrasi e-planning dengan e-budgeting* sebagai fungsi pengendalian pembangunan; (5) tingkat kinerja perencanaan pembangunan daerah yang ditunjukkan oleh: jumlah pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah, tingkat konsistensi pelaksanaan program pembangunan daerah; (6) tingkat kreatifitas dan inovasi sumberdaya aparatur Bappeda ditunjukkan oleh: jumlah jumlah sumber daya aparatur Bappeda yang berkualitas dan berdaya saing, tingkat kemampuan dan kesesuaian sumber daya aparatur dengan tugas dan fungsi Bappeda (7) tingkat pelayanan kerja yang memadai yang ditunjukkan oleh jumlah layanan pengadaan sarana dan prasarana kerja, tingkat kesuaian kebutuhan sarana prasarana kerja, tingkat layanan operasional perkantoran, jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja serta pengelolaan keuangan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

No	Sasaran Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kab. Barito Selatan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten	Kurang optimalnya pemanfaatan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta penataan database dan informasi	Kurangnya komitmen dan konsistensi perangkat daerah pelaksana atas perencanaan	Dukungan teknologi informasi dan jejaring dengan pengelola di kementerian untuk memudahkan

		perencanaan pembangunan yang belum terorganisasi dengan baik.	pembangunan daerah, dan terbatasnya anggaran serta adanya kepentingan politik.	koordinasi dan sinkronisasi tingkat Pusat dan Daerah.
2	Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan dan daya saing daerah.	Kurang optimalnya implementasi dalam mewujudkan pengembangan litbang dan inovasi daerah	Penelitian dan pengembangan pada Bappeda hanya ditangani oleh satu sub bidang penelitian dan pengembangan, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dibidang penelitian dan pengembangan, dan belum dibentuknya Dewan Riset daerah serta belum memiliki SOP kelitbangan.	Tersedianya dukungan program, kegiatan dan anggaran untuk pengembangan litbang dan jumlah inovasi yang dapat dijadikan inovasi daerah untuk mendukung pembangunan daerah
3	Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif.	Kurang optimalnya pemanfaatan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antara perencanaan dan implementasi pelaksanaan program serta koordinasi dan sinkronisasi belum dimanfaatkan secara optimal.	Dukungan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja pengendalian dan evaluasi.

2.3.3 Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Barito Selatan Visi Pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026 adalah **“Barito Selatan yang Maju, Mandiri dan Profesional yang Beriman dan Bertaqwa”**.

Melalui sinkronisasi dan harmonisasi dengan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 maka Misi RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 adalah ;

- MISI 1** : Mempercepat Pengembangan Dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Yang Produktif, Kreatif Dan Berwawasan Lingkungan
- MISI 2** : Memperkuat Ketahanan Daerah Dan Kondisi Politik, Meningkatkan Pelayanan Sosial, Permukiman Dan Mengantisipasi Perubahan Global
- MISI 3** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Profesionalisme Pegawai Yang Efektif, Efisien dan Reformasi Birokrasi
- MISI 4** : Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing
- MISI 5** : Mewujudkan Bارسel Yang Beriman, Berbudaya Dan Berkesetaraan Gender

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi tersebut, Bappeda Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya menjalankan tugas dalam misi 3 (tiga) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Profesionalisme Pegawai Yang Efektif, Efisien dan Reformasi Birokrasi”. Berdasarkan rumusan isu-isu strategis seperti diuraikan pada bab sebelumnya dan tugas serta fungsi yang diemban Bappeda untuk periode 2023-2026 menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu “ Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel”. Untuk mencapai tujuan tersebut ditentukan 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah;
2. Menguatnya peran litbang dan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai permasalahan dan hambatan yang akan berdampak pada visi dan misi khususnya pada misi ketiga yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Profesionalisme yang Efektif, Efisien dan Reformasi Birokrasi.

2.3.4 Tantangan dan Peluang

Sesuai dengan capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan tahun 2017-2022, maka terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Bappeda Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk

menyelenggarakan perencanaan daerah serta penelitian dan pengembangan daerah. Tantangan tersebut antara lain :

1. Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran;
2. Dokumen perencanaan serta data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya bisa digunakan dan dimanfaatkan sesuai komitmen awal dalam proses perencanaan dan sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan;
3. Belum optimalnya koordinasi perangkat daerah dan mekanisme sinkronisasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah;

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Bappeda Kab. Barito Selatan dalam melaksanakan perencanaan, penelitian dan pengembangan antara lain :

1. Terbitnya Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Kepmen 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmen 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menjadi pedoman yang akan menjadi komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga konsistensi perencanaan sehingga konsistensi RPJMD kedalam RKPD berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
2. Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan;
3. Komitmen PD lain untuk melaksanakan sistem perencanaan dan dukungan database perencanaan dari PD lain;
4. Terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
5. Kemudahan pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai acuan perencanaan pembangunan melalui aplikasi SIPD;
6. Pengembangan dan pemanfaatan inovasi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah untuk perencanaan pembangunan daerah.

2.3.5 Rekomendasi

1. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM perencana, serta sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang sistem perencanaan.
2. Melibatkan semua unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui keikutsertaan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
3. Meningkatkan kegiatan penelitian, pengkajian ataupun telaahan akademis untuk menghasilkan rekomendasi bagi penetapan kebijakan dlm rangka *problem solving*.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan terhadap Renja Bappeda Tahun 2022 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Bappeda yang tercantum di dalam RKPD 2022;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Bappeda berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya; Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan Bappeda yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
3. Memastikan bahwa program/kegiatan di Bappeda yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam RKPD tahun 2022.
4. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan Bappeda yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai;
5. Membuat rumusan kebutuhan program dan kegiatan Bappeda hasil review terhadap RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan;
6. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Bappeda Kabupaten Barito Selatan telah memfasilitasi usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), usulan tersebut ditelaah oleh bidang-bidang perencana di Bappeda dan kemudian diteruskan kepada Perangkat Daerah terkait untuk diusulkan melalui forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Provinsi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai pelaksana fungsi urusan penunjang bidang perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan, maka Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu menelaah perubahan-perubahan kebijakan pembangunan nasional yang difokuskan kepada prioritas pembangunan nasional. Salah satu kebijakan pemerintah pusat yang paling mendasar dan mempengaruhi arah kebijakan perencanaan daerah adalah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut mengamanatkan adanya pengalihan beberapa kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi, dari provinsi ke kabupaten/kota, dari provinsi ke pusat, dan sebaliknya. Perubahan mendasar dari kebijakan tersebut mengakibatkan bertambahnya kewenangan dan tanggungjawab Kabupaten/Kota dalam menjalankan urusan pembangunan, sehingga akan berdampak kepada perubahan program dan kegiatan pembangunan, serta alokasi penganggaran, sehingga diperlukan perencanaan yang matang.

Keselarsan perencanaan antara tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra dilakukan telaah terhadap Renstra BAPPENAS. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis baik dalam Renstra Bappenas terutama yang terkait langsung dengan pelayanan Bappeda Kabupaten Barito Selatan. Kementerian PPN/Bappenas dalam Renstra 2020-2024 menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang telah dirumuskan yaitu :

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.
3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.
4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Dari 4 (empat) sasaran strategis tersebut, yang terkait langsung dengan pelayanan Bappeda Kabupaten Barito Selatan adalah sasaran 1 (satu) yaitu terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional, kata kunci dalam sasaran tersebut adalah perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Salah satu ukuran

keberhasilan perencanaan tingkat nasional yang dipengaruhi oleh perencanaan di daerah adalah keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja daerah.

Tabel 3. 1
Permasalahan Pelayanan Bappeda Kab. Barito Selatan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian PPN / Bappenas Beserta Faktor Penghambat/Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Kementerian PPN/Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kab. Barito Selatan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Penataan database dan informasi perencanaan pembangunan yang belum terorganisasi dengan baik.	Terbatasnya SDM yang kompeten di bidang database dan belum terintegrasinya sistem manajemen database perencanaan pembangunan	Dukungan teknologi informasi dan jejaring dengan aktor di kementerian kunci memudahkan koordinasi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai dan menjadi ukuran keberhasilan kinerja. Penetapan tujuan didasarkan pernyataan Visi dan Misi serta mengakomodasi isu-isu tren yang berkembang kearah perubahan. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai dimasa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi. Salah satu konsep yang terkenal untuk merumuskan tujuan secara efektif adalah konsep S.M.A.R.T (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely). Tujuan yang ditetapkan harus jelas dan spesifik, bisa diukur, bisa dicapai, realistis atau masuk akal, dan kapan tujuan tersebut harus dicapai.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Renja Bappeda mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito

Selatan Periode 2023-2026, oleh karena itu tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kabupaten Barito Selatan harus diarahkan pada upaya pembangunan yang berkesinambungan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan sebagai dasar perumusan dan implementasi kebijakan sesuai dengan visi Kabupaten Barito Selatan untuk mewujudkan Barito Selatan sebagai daerah yang maju dan mandiri, sehingga terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera secara merata dan memiliki daya saing dilandasi iman dan taqwa.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal Kriteria B
		Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)
		Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2. Meningkatkan kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat	Menguatnya peran litbang dan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil Kajian Kelitbangan yang di implementasikan dan inovasi yang ditindaklanjuti

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda akan melaksanakan penyusunan program dan kegiatan yang tidak terlepas dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan yang tertuang pada RPD Tahun 2023 - 2026. Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan telah merumuskan 4 Program dan 18 kegiatan dan 82 Sub Kegiatan.

Untuk Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan mempunyai Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

	Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

	1	Pengadaan Mebel
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
	1	Pelaksanaan Konsultasi Publik
	2	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
	3	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
	4	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
	5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
	2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.
	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
	1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
	2	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
	3	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan

		Pengkajian Peraturan
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
	1	Fasilitasi dan Pengembangan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
	3	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
		Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Barito Selatan yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Program dan kegiatan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

1. Pengkoordinasian kebijakan perencanaan pembangunan secara terpadu lintas Negara, lintas daerah, lintas urusan pemerintah, antar pemerintah daerah dengan pusat dan antar lintas pelaku lainnya;
2. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan dibawah bidang Litbang, perencanaan program dan pengendalian;
3. Pengkoordinasian kebijakan pengembangan wilayah berada dibawah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
4. Pengkoordinasian kebijakan perencanaan dibidang pembangunan perekonomian berada dibawah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
5. Pengkoordinasian pembangunan kesejahteraan masyarakat berada dibawah bidang kesejahteraan rakyat, kependudukan dan pemerintahan;

Dari 4 Program dan 18 kegiatan dan 82 Sub Kegiatan yang dirumuskan pada rancangan awal RKPd Tahun 2022 telah dilakukan penelaahan baik nama judul maupun alokasi anggaran. Perubahan nama judul kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan kaidah bahasa yang benar, dengan tidak merubah arti dan makna dari substansi kegiatan yang ada di rancangan awal RKPd.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan organisasi Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Barito Selatan secara detail kami sajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. 1
Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah Bappeda Kab. Barito Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelom- pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasiona l	Daerah					
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5	0 1						8.259.570.70 4						8.259.570.70 4			
5	0 1	0 1					6.029.003.70 4						6.029.003.70 4			
5	0 1	0 1	2,0 1				60.089.000						60.089.000			
5	01	01	2,0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	7.389.000		Dana Transfe r Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintah n yang akuntabel.	2 Dokumen	7.389.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5	01	01	2,0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	10.000.000		Dana Transfe r Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintah n yang akuntabel.	1 Dokumen	10.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5	01	01	2,0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	10.000.000		Dana Transfe r Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintah n yang akuntabel.	1 Dokumen	10.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH

5	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	6.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		1 Dokumen	6.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	6.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		1 Dokumen	6.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	13.373.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		2 Laporan	13.373.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7.327.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		7 Laporan	7.327.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.832.264.704							4.832.264.704	
5	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bul	an 4,547,326,704		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		47 Orang/bul	an 4,547,326,704	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	220.600.000		Dana Transfer Umum -Dana		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang		2 Dokumen	220.600.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

												Alokasi Umum		akuntabel.					
5	01	01	2,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	20.600.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.	1 Dokumen	20.600.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	10.138.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.	2 Laporan	10.138.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	01	2,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	5.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.	2 Dokumen	5.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	n poran apora n esteran				18 Laporan	20.600.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.	18 Laporan	20.600.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	8.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.	2 Dokumen	8.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						65.773.270					65.773.270			

5	01	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2.273.270		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		2 Dokumen	2.273.270	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				7 Laporan	63.500.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		7 Laporan	63.500.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						82.112.000							82.112.000	
5	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	50.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		1 Paket	50.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	27.112.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		4 Dokumen	27.112.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	5.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		1 Orang	5.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						493.481.330							493.481.330	
5	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	28.481.330		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		1 Paket	28.481.330	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

5	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		1 Paket	30.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	20.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		1 Paket	20.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		1 Paket	30.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				24 Laporan	90.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		24 Laporan	90.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	265.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		75 Laporan	265.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	30.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		1 Dokumen	30.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						43.000.000							43.000.000	

5	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	13.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		4 Unit	13.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	30.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		2 Unit	30.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						362.283.400							362.283.400	
5	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		12 Laporan	6.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				11 Laporan	251.150.400		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		11 Laporan	251.150.400	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	5.133.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		12 Laporan	5.133.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	100.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		12 Laporan	100.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

5	0	0	2,0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						90.000.000						90.000.000	
5	01	01	2,0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit		20.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		1 Unit	20.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2,0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			80 Unit		20.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		80 Unit	20.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2,0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit		30.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		1 Unit	30.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2,0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit		20.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		1 Unit	20.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	0	0			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						789.767.000						789.767.000	
5	0	0	2,0		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						445.000.000						445.000.000	

5	01	02	2,0 1	0 3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	15.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		1 Berita Acara	15.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2,0 1	0 4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				3 Berita Acara	55.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		3 Berita Acara	55.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2,0 1	0 5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	55.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		1 Berita Acara	55.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2,0 1	0 6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				30 Usulan	120.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		30 Usulan	120.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2,0 1	0 7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perenc Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD	anaan /RKPD)			3 Dokumen	200.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		3 Dokumen	200.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2,0 2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						140.000.000						140.000.000	

5	01	02	2,0 2	0 1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				31 Dokumen	30.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		31 Dokumen	30.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2,0 2	0 2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				31 Orang	70.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		31 Orang	70.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2,0 2	0 3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	40.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		1 Buku	40.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2,0 3		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						204.767.000							204.767.000	
5	01	02	2,0 3	0 1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	114.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		4 Laporan	114.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2,0 3	0 3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	90.767.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		4 Laporan	90.767.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						1.440.800.000							1.440.800.000	

5	01	03	2,01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia													488.990.000											488.990.000	
5	01	03	2,01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	25.000.000			Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		2 Dokumen	25.000.000											BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2,01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				7 Perangkat Daerah	15.000.000			Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		7 Perangkat Daerah	15.000.000											BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2,01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				7 Laporan	30.000.000			Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		7 Laporan	30.000.000											BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2,01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				7 Laporan	50.000.000			Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		7 Laporan	50.000.000											BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2,01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	130.000.000			Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		3 Dokumen	130.000.000											BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

5	01	03	2,0 1	0 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				9 Perangkat Daerah	15.000.000		Dana Transfe r Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintah n yang akuntabel.		9 Perangkat Daerah	15.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5	01	03	2,0 1	0 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				9 Perangkat Daerah	55.000.000		Dana Transfe r Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintah n yang akuntabel.		9 Perangkat Daerah	55.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5	01	03	2,0 1	0 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				9 Laporan	168.990.000		Dana Transfe r Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintah n yang akuntabel.		9 Laporan	168.990.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5	0	0	2,0		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						416.910.000							416.910.000	
5	01	03	2,0 2	0 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	113.380.000		Dana Transfe r Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintah n yang akuntabel.		3 Dokumen	113.380.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5	01	03	2,0 2	0 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				6 Perangkat Daerah	3.250.000		Dana Transfe r Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintah n yang akuntabel.		6 Perangkat Daerah	3.250.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH

5	01	03	2,0 2	0 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				6 Perangkat Daerah	47.000.000		Dana Transfe r Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintah n yang akuntabel.		6 Perangkat Daerah	47.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5	01	03	2,0 2	0 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				2 Laporan	126.000.000		Dana Transfe r Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintah n yang akuntabel.		2 Laporan	126.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5	01	03	2,0 2	0 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	33.030.000		Dana Transfe r Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintah n yang akuntabel.		2 Dokumen	33.030.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5	01	03	2,0 2	0 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				3 Perangkat Daerah	2.250.000		Dana Transfe r Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintah n yang akuntabel.		3 Perangkat Daerah	2.250.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5	01	03	2,0 2	0 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				3 Perangkat Daerah	50.000.000		Dana Transfe r Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintah n yang akuntabel.		3 Perangkat Daerah	50.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5	01	03	2,0 2	0 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	42.000.000		Dana Transfe r Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintah n yang akuntabel.		1 Laporan	42.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH

5	01	03	2,03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan														534.900.000														534.900.000	
5	01	03	2,03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					6 Dokumen	31.150.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		6 Dokumen	31.150.000															BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2,03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur					6 Perangkat Daerah	7.150.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		6 Perangkat Daerah	7.150.000															BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2,03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur					6 Perangkat Daerah	150.150.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		6 Perangkat Daerah	150.150.000															BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2,03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur					6 Laporan	180.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		6 Laporan	180.000.000															BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2,03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					6 Dokumen	31.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.		6 Dokumen	31.000.000															BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

5	01	03	2,0 3	0 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				6 Perangkat Daerah	7.150.000	Dana Transfe r Umum -Dana Alokasi Umum	5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintah n yang akuntabel.	6 Perangkat Daerah	7.150.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5	01	03	2,0 3	0 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				6 Perangkat Daerah	55.150.000	Dana Transfe r Umum -Dana Alokasi Umum	5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintah n yang akuntabel.	6 Perangkat Daerah	55.150.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5	01	03	2,0 3	0 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				6 Laporan	73.150.000	Dana Transfe r Umum -Dana Alokasi Umum	5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintah n yang akuntabel.	6 Laporan	73.150.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5	0	5			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						115.000.000			115.000.000		
5	0	5	0	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						115.000.000				115.000.000	
5	0	5	0	2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						30.000.000				30.000.000	
5	05	02	2,0 1	1 2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	10.000.000	Dana Transfe r Umum -Dana Alokasi Umum	5.2. Meningkatny a kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat.	1 Laporan	10.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH

5	05	02	2,0 1	1 3	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan				1 Rekomenda	si 10,000,000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	5.2. Meningkatkan kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat.		1 Rekomenda	si 10,000,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	05	02	2,0 1	1 4	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				1 Laporan	10.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	5.2. Meningkatkan kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat.		1 Laporan	10.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	05	02	2,0 2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						30.000.000						30.000.000	
5	05	02	2,0 2	0 2	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1 Dokumen	10.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	5.2. Meningkatkan kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat.		1 Dokumen	10.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	05	02	2,0 2	0 5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	10.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	5.2. Meningkatkan kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat.		1 Dokumen	10.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	05	02	2,0 2	0 6	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	10.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	5.2. Meningkatkan kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat.		1 Dokumen	10.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	05	02	2,0 3		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						25.000.000						25.000.000	

5	05	02	2,03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	5.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.2. Meningkatkan kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat.		1 Dokumen	5.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	05	02	2,03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	5.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.2. Meningkatkan kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat.		1 Dokumen	5.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	05	02	2,03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				1 Dokumen	5.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.2. Meningkatkan kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat.		1 Dokumen	5.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	05	02	2,03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				1 Dokumen	5.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.2. Meningkatkan kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat.		1 Dokumen	5.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	05	02	2,03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika				1 Dokumen	5.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.2. Meningkatkan kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat.		1 Dokumen	5.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	05	02	2,03	4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi						30.000.000							30.000.000		
5	05	02	2,04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	30.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.2. Meningkatkan kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat.		1 Dokumen	30.000.000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	
TOTAL											8.374.570.704								8.374.570.704	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023, merupakan penjabaran dari Renstra Bappeda Tahun 2023 – 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022. Dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja Tahun 2023 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023, untuk mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2023.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur di lingkungan Bappeda Kabupaten Barito Selatan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2023 secara efektif dan efisien;
2. Renja Tahun 2023 sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun 2023, dimana Renja Tahun 2023 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, Bappeda wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2023, sesuai dengan Tupoksi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan. Bappeda wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2023.
4. Renja Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.